

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT* TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU)

**Rico Ales Sandra  
Kennedy  
Rheny**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

**ABSTRAK**

*This study aimed to examine the effect of performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems and the application of good government on performance appraisal work unit area in Indragiri Hulu.*

*The data in this study were collected by using a survey method with the help of a questionnaire research instruments totaling 72 pieces were distributed directly to 24 working units that exist in the upstream Indragiri Hulu addressed directly to the chief financial officer, treasurer, and staff compiler financial statements work on the local work force. The data in this study will be analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software version 17.0. To test the validity and reliability of research instrument used Pearson correlation and Cronvach Alpha. Besides, it is also done testing data normalization using a normal probability plot.*

*The results of this study indicate that the performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems and the application of good government and a significant positive effect on performance appraisal work unit area.*

*Keywords: Performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems area, the application of good government, performance assessment work unit area*

**PENDAHULUAN**

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Penyusunan APBD berbasis prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan

capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar blanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah

dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau disebut juga Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2009. Dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu. Dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini diperoleh informasi penyerapan dana secara keseluruhan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Anggaran**

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai suatu perkiraan atau estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk melayani aktivitas yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Anggaran menurut Bastian (2006) dapat diinterpretasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang.

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program

bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan program anggaran dimulai dengan perumusan dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.
2. *Output* (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
3. *Input* (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara *input* (masukan) dengan *output* (keluaran).

### **Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja**

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB. Dalam hal ini prinsip-prinsip anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**  
Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b. **Disiplin anggaran**  
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

c. **Keadilan anggaran**  
Perguruan tinggi wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok sivitas akademika dan karyawan tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan perguruan tinggi pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

d. **Efisiensi dan efektivitas anggaran**  
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan

peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

e. **Disusun dengan pendekatan kinerja**  
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

### **Tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementerian Negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2007:83) berikut ini :

1. Penetapan strategi organisasi (Visi dan Misi)
2. Pembuatan Tujuan
3. Penetapan Aktivitas
4. Evaluasi dan Pengambilan keputusan

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005). Dalam struktur pemda, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang

terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Nordiawan (2007) kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi:

- a) Prosedur akuntansi penerimaan kas
- b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas
- c) Prosedur akuntansi aset
- d) Prosedur akuntansi selain kas

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) merupakan sistem yang terdiri dari bermacam-macam program Penyusunan/Penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pmendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Pmendagri No. 59 Tahun 2007 No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Penilaian Kinerja SKPD**

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Pmendagri Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1).

Fokus pengukuran kinerja pada awalnya adalah pengukuran tingkat efisiensi. Hal tersebut berhubungan erat dengan objek pembahasan pada awalnya yaitu pengukuran kinerja kegiatan usaha swasta. Ketika

kesadaran para pengambil kebijakan muncul bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya, maka pembahasan yang intensif mengenai pengukuran kinerja pemerintah dimulai. Meskipun demikian, masalah muncul ketika disadari bahwa untuk pelayanan publik banyak sekali hal-hal yang bersifat kualitatif.

### **Penerapan *Good Government***

Tercapainya kinerja organisasi bukan saja ditentukan oleh banyaknya banyaknya pegawai akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang di sebut *good government*.

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan/korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Dengan pengertian lain *good government* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintahan seperti organisasi publik pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang mencakup Kepemimpinan, Struktur organisasi dan sumberdaya manusianya.

### **METODE PENELITIAN**

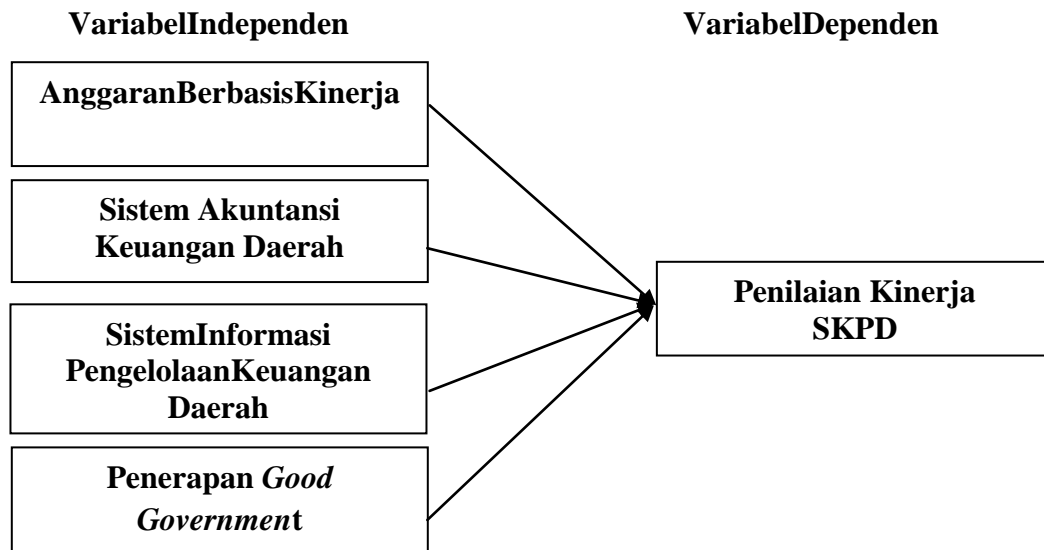
#### **1. Model Penelitian**

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen

yang digunakan dalam penelitian ini maka  
berikut digambarkan variabel penelitian

yang digunakan :

**Gambar 2**  
**Model Penelitian**



2. Hipotesis Penelitian

H1 : Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H3 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H4 : Penerapan *Good Government* Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi objek dari penelitian dalam penulisan ini adalah :

**Tabel 2**

**Daftar SKPD Lingkup Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )
2	Badan Penanaman Modal daerah ( BPMD )
3	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda )
4	Badan Pengawas Daerah ( Bawasda )
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ( Bapemades )
6	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Infokom
7	Badan Pendidikan dan Pelatihan
8	Dinas Pendapatan Daerah

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
9	Dinas Pendidikan
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Penduduk
13	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural, Peternakan dan Perikanan
14	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
15	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
16	Dinas Pertambangan dan Energi
17	Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata
18	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
19	Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana
20	Dinas Pertahanan
21	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
22	Kantor Arsip dan Perpustakaan
23	Kantor Kesejahteraan Sosial
24	Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

Sumber : [www.inhukab.go.id](http://www.inhukab.go.id)

Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah sebanyak 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sampel yang diambil dari tiap-tiap unit satuan kerja perangkat daerah adalah sebanyak 3 orang yang menjadi tim dalam penentuan sistem yang berlaku. Jadi total keseluruhan sampel yang diambil adalah sebanyak 72 orang.

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data subjek yang menunjukkan opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer.

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu (1) metode survey, (2) metode observasi dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, dalam penelitian ini peneliti mengirimkan daftar kuesioner yang bekerja pada posisi yang berbeda-beda didalam organisasinya masing-masing. Mereka berada pada posisi: Kepala Bagian dan

Kepala SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Kuesioner penelitian diadopsi dari kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu.

Kuesioner anggaran berbasis kinerja, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diadopsi dari Silalahi (2012), kuesioner ini akan menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=Tidak Setuju), skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner sistem akuntansi keuangan daerah mengadopsi kuesioner dari Silalahi (2012), kuesioner ini menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=Tidak Setuju), skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner sistem pengelolaan keuangan daerah mengadopsi kuesioner dari Silalahi (2012), kuesioner ini menghasilkan data

interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner penerapan *good government* diadopsi dari bagus (2010), kuesioner ini menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3(N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner penilaian kinerja SKPD diadopsi dari Silalahi (2012), kuesioner ini menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Selanjutnya berdasarkan kuesioner yang telah disusun dan dirumuskan secara matang, kuesioner disampaikan kepada masing-masing responden dengan tujuan untuk memperoleh data. Secara umum, kontruksi didalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert yang berisi lima poin, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah menggunakan regresi linear berganda. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a+b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 +b_4x_4 + e$$

Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 17.00.

1. Uji Kualitas Data
  - a. Uji Validitas
  - b. Uji Reliabilitas
2. Uji Normalitas Data
3. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Multikolinieritas
  - b. Uji Heteroskedastisitas
  - c. Uji Autokorelasi
4. Koefisien Determinasi
5. Pengujian Hipotesis
  - a. Uji Signifikan F (Uji F)
  - b. Uji Signifikan t (Uji t)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Total kuesioner yang dikirim adalah 72 kuesioner yang diberikan secara langsung kepada tiap-tiap responden. Total kuesioner yang diterima peneliti adalah sebanyak 70 kuesioner. Sebanyak 2 kuesioner tidak digunakan dalam analisa selanjutnya dikarenakan ada beberapa item pertanyaan yang tidak diisi secara lengkap. Dengan demikian jumlah kuesioner yang layak untuk dianalisa lebih lanjut sebanyak 70 kuesioner. Untuk lebih jelasnya rincian tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4

**Tabel 4**  
**Daftar Kuesioner**

Item	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	72	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	1	1,39%
	71	
Jumlah kuesioner yang pengisian jawaban tidak lengkap	1	1,39%

Jumlah kuesioner yang pengisian data diri tidak lengkap	0	0%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel)	70	97,22%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Profil Responden**

Data	Jumlah	Presentase
<b>Jenis Kelamin:</b>		
Laki-laki	43	61,43%
Perempuan	27	38,57%
<b>Pendidikan:</b>		
SMA	6	8,57%
DIII	8	11,43%
S1	54	77,14%
S2	2	2,86%
<b>Lama Bekerja:</b>		
0-5 Tahun	20	28,57%
6-10 Tahun	23	32,86%
11-15 Tahun	8	11,43%
Diatas 15 Tahun	19	27,14%

Sumber: Data diolah, 2014

Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa objek penelitian pria lebih banyak dari wanitanya sebesar 61,43%. Responden penelitian ini mayoritas memiliki pendidikan S1 sebesar 77,14%. Sebagian besar dari mereka telah bekerja selama 6-10 tahun yaitu sebesar 32,86%.

#### **Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data**

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas yang memperlihatkan ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran variabel dan untuk mengetahui konsistensi alat ukur.

Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dan validitas yaitu uji realibilitas dengan melihat koefisien (*Cronbach*) *Alpha*. Nilai reliabilitas dilihat dari *cronbach alpha* masing-masing instrument penelitian jika memiliki *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 dianggap reliabel. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor butir dengan skor faktor harus berkorelasi positif, kemudian membandingkan *r* table dengan *r* hasil dari tiap butir pertanyaan. Secara rinci hasil uji reliabilitas dan hasil validitas adalah sebagai berikut :



## Penilaian Kinerja SKPD

Item-Total Statistics

	Corrected Item- Total Correlation ( r hitung )	r table	VALIDITAS
K1	.499	.235	Valid
K2	.369	.235	Valid
K3	.266	.235	Valid
K4	.330	.235	Valid
K5	.476	.235	Valid

## Anggaran Berbasis Kinerja

Item-Total Statistics

	Corrected Item- Total Correlation ( r hitung )	r table	VALIDITAS
AB1	.318	.235	Valid
AB2	.552	.235	Valid
AB3	.317	.235	Valid
AB4	.491	.235	Valid
AB5	.341	.235	Valid

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Item-Total Statistics

	Corrected Item- Total Correlation ( r hitung )	r table	VALIDITAS
SAKD1	.521	.235	Valid
SAKD2	.407	.235	Valid
SAKD3	.498	.235	Valid
SAKD4	.379	.235	Valid
SAKD5	.315	.235	Valid

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

**Item-Total Statistics**

	Corrected Item- Total Correlation ( r hitung )	r table	VALIDITAS
SIP1	.663	.235	Valid
SIP2	.553	.235	Valid
SIP3	.530	.235	Valid
SIP4	.532	.235	Valid
SIP5	.348	.235	Valid

## Penerapan *Good Government*

**Item-Total Statistics**

	Corrected Item- Total Correlation ( r hitung )	r table	VALIDITAS
GG1	.539	.235	Valid
GG2	.679	.235	Valid
GG3	.749	.235	Valid
GG4	.660	.235	Valid
GG5	.523	.235	Valid
GG6	.492	.235	Valid
GG7	.582	.235	Valid
GG8	.698	.235	Valid
GG9	.627	.235	Valid
GG10	.644	.235	Valid

Berdasarkan gambar pada tabel terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5 %. Berdasarkan hasil

ini maka setiap variabel dinyatakan lolos hasil uji validitas.

## Hasil Uji Reliabilitas

### Hasil Uji Reliabilitas Penilaian Kinerja SKPD

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.627	5

### Hasil Uji Reliabilitas Anggaran Berbasis Kinerja

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.645	5

### Hasil Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.669	5

### Hasil Uji Reliabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.755	5

### Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Good Government

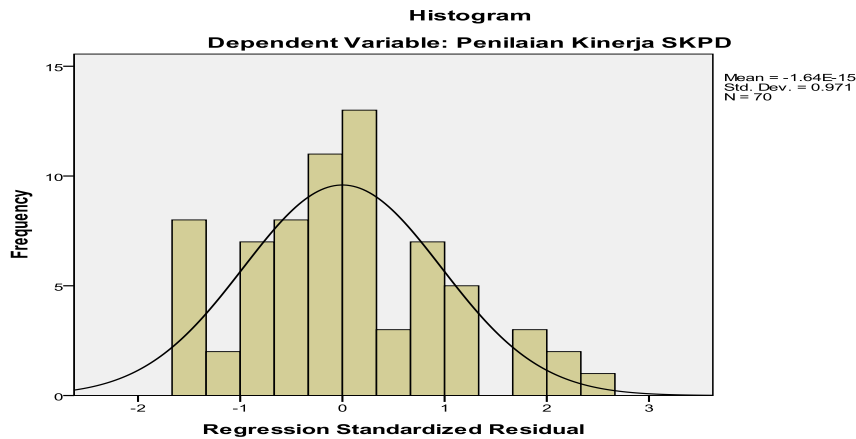
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.885	5

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* > 0,5 untuk variabel penerapan good government dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa semua variabel adalah reliabel.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik

### Hasil Pengujian Normalitas Data

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

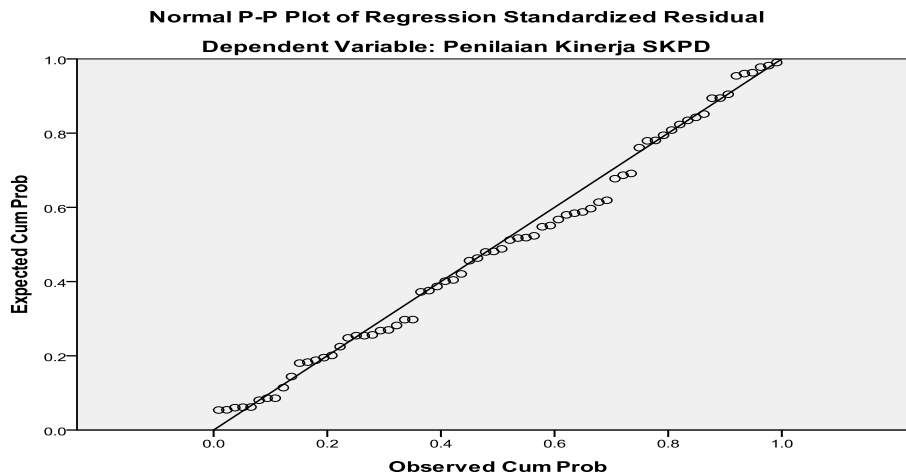


Histogram pada Gambar 3 di atas telah memperlihatkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan tepat ditengah,

dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

**Gambar 3**

**Hasil Uji Normalitas**



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-

model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Pengujian *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis

dengan menggunakan SPSS versi 17. Apabila nilai *tolerance value* lebih tinggi dari pada 0,01 atau VIF lebih kecil dari pada 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala *multikolinearitas* di dalam model penelitian.

Hasil pengujian *multikolinearitas* dapat diperhatikan pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

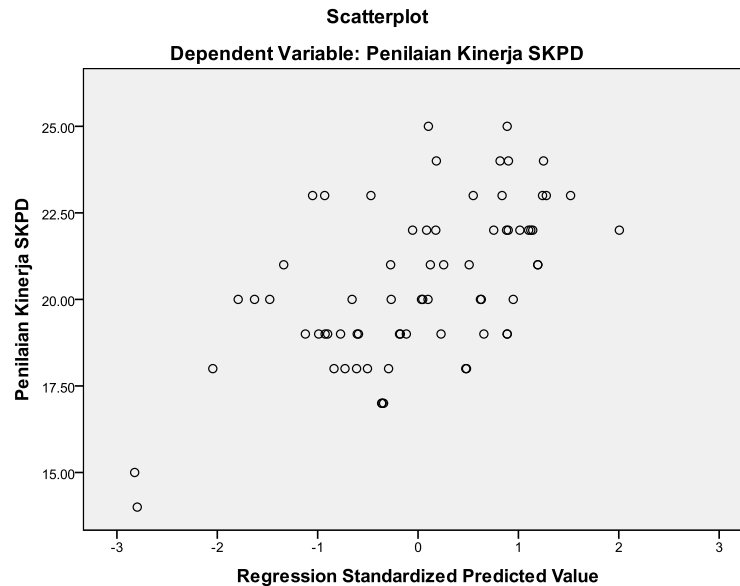
Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.777	2.716		
Anggaran Berbasis Kinerja	1.078	.122	.481	2.077
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.185	.116	.455	2.198
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.479	.121	.449	2.229
Penerapan Good Governance	.408	.150	.917	1.090

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *good government* memiliki nilai *tolerance* yang lebih tinggi dari pada 0,01. Selain itu, nilai VIF dari masing-masing variabel bebas tersebut tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian, tidak terjadi *multikolinearitas* dalam penelitian ini.

### Hasil Pengujian *Heteroskedastisitas*

*Heterokedastisitas* terjadi apabila varian error tidak konstan untuk beberapa nilai n. Terjadi atau tidak terjadinya *heterokedastisitas* dapat diperlihatkan oleh *scatterplot*. Jika data berkumpul dan membentuk pola tersendiri, maka terdapat indikasi *heterokedastisitas*. sebaliknya, jika data menyebar tanpa membentuk pola, maka dapat dikatakan tidak terjadi *heterokedastisitas*. Hasil pengujian *heterokedastisitas* dapat diperhatikan pada Gambar 4 berikut:

**Gambar 4**  
**Hasil Pengujian *Heteroskedastisitas***



*scatterplot* pada Gambar 4 di atas menunjukkan adanya titik (*plot*) yang menyebar, dengan demikian, tidak terjadi *heterokedastisitas* dalam model regresi penelitian ini.

variabel independent terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi berganda terhadap model penelitian yang diajukan dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 17. Data statistik hasil olahan SPSS versi 17 diperlihatkan pada tabel berikut :

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.777	2.716		3.968	.000
Anggaran Berbasis Kinerja	1.078	.122	.092	2.638	.015
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.185	.116	.109	2.734	.025
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.479	.121	.595	3.969	.000

Penerapan Good Governance	.408	.150	.417	3.166	.001
---------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penilaian Kinerja SKPD

Berdasarkan tabel 8, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penilaian Kinerja SKPD} = & 10.777 + 1.078 \\ & \text{ABK} + 0.185 \\ & \text{SAKD} + 0,479 \\ & \text{SIPKD} + 0.408 \\ & \text{Penerapan GG} \end{aligned}$$

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) adalah 10.777 artinya, jika anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *good government* bernilai 0 (nol), maka penilaian kinerja SKPD bernilai positif, yaitu 10.777
2. Anggaran berbasis kinerja memiliki arah hubungan yang positif sejauh 1.078 terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan kata lain, semakin besar anggaran berbasis kinerja akan berakibat pada semakin besarnya penilaian kinerja SKPD. sebaliknya, semakin kecil anggaran berbasis kinerja akan berakibat pada semakin kecil pula penilaian kinerja SKPD. Dengan asumsi bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja sebesar 1 akan menyebabkan kenaikan pada penilaian kinerja SKPD sebesar 1.078. Sebaliknya, penurunan anggaran berbasis kinerja sebesar 1 akan menyebabkan penurunan pada penilaian kinerja SKPD sebesar 1.078.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0.185 terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan kata lain, semakin besar SAKD akan berakibat pada semakin besarnya penilaian kinerja SKPD sebaliknya, semakin kecil SAKD akan berakibat pada semakin kecil pula penilaian kinerja SKPD. Dengan asumsi bahwa setiap kenaikan SKPD sebesar 1 akan menyebabkan kenaikan pada penilaian kinerja SKPD sebesar 0,185. Sebaliknya, penurunan SAKD sebesar 1 akan menyebabkan penurunan pada penilaian kinerja SKPD 0,185.
4. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0.479 terhadap Penilaian kinerja SKPD. Dengan kata lain, semakin besar SIPKD akan berakibat pada semakin besarnya Penilaian kinerja SKPD sebaliknya, semakin kecil SIPKD akan berakibat pada semakin kecil pula Penilaian kinerja SKPD. Dengan asumsi bahwa setiap kenaikan SIPKD sebesar 1 akan menyebabkan kenaikan pada Penilaian kinerja SKPD sebesar 0,479. Sebaliknya, penurunan SIPKD sebesar 1 akan menyebabkan penurunan pada Penilaian kinerja SKPD sebesar 0,479.
5. Penerapan *good government* memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0.408 terhadap Penilaian kinerja SKPD. Dengan kata lain, semakin besar

Penerapan *good government* akan berakibat pada semakin besarnya Penilaian kinerja SKPD sebaliknya, semakin kecil Penerapan *good government* akan berakibat pada semakin kecil pula Penilaian kinerja SKPD. Dengan asumsi bahwa setiap kenaikan Penerapan *good government* sebesar 1 akan menyebabkan kenaikan pada Penilaian kinerja SKPD sebesar 0,408. Sebaliknya, penurunan Penerapan *good government* sebesar 1 akan menyebabkan penurunan pada Penilaian kinerja SKPD sebesar 0,408.

Adapun acuan dalam pengujian hipotesis adalah :

- jika  $t \text{ hitung} < t \text{ table}$  atau  $p \text{ value} > \alpha$  (0,05), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima
- jika  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$  atau  $p \text{ value} < \alpha$  (0,05), maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

Dengan melihat hasil SPSS versi 17 pada tabel 9, dan memperhatikan  $t$  tabel yang dilihat pada tabel  $t$  0,025 (0,05 : 2 ) dengan  $Df$  ( $n-k-1$ ) = 64. Nilai  $t$  tabel diperoleh sebesar 1,997. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

### **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Untuk menguji hipotesis pertama, hasil analisis regresi berganda dapat diperhatikan Tabel berikut :

**Tabel 9.**

**Hasil Pengaruh ABK terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Model	T	Sig.	Hasil
Anggaran Berbasis Kinerja	2.638	0.015	Berpengaruh

Dependent Variabel: Penilaian Kinerja SKPD

$t$ -hitung = 2,638 dan  $p \text{ value} = 0,015$   
 $t$ -hitung (2,638) >  $t$ -tabel (1,997)  $p \text{ value} (0,015) < \alpha$  (0,05)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Anggaran berbasis kinerja memiliki  $t$  hitung sebesar 2.638 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.015 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_o$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD dengan demikian hipotesis pertama terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

maka akan berimplikasi meningkatkan penilaian kinerja SKPD.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berdasarkan output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumberdayanya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Berdasarkan pengertian diatas komponen-komponen visi, misi, dan rencana strategis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Begitu halnya dengan penetapan indikator-indikator pencapaian kinerja berupa indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) pastilah



telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran yaitu rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD). Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja organisasi dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi setiap kerja perangkat daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Penilaian kinerja SKPD. Anggaran Berbasis Kinerja disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

**Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Untuk menguji hipotesis kedua, dapat diperhatikan Tabel berikut:

**Tabel 10.**

**Hasil Pengaruh SAKD terhadap Penilaian kinerja SKPD**

Model	T	Sig.	Hasil
SAKD	2.734	0.025	Berpengaruh

Dependen Variabel: Penilaian Kinerja SKPD

t-hitung = 2,734 dan p value= 0,025  
t-hitung (2,734) >t-tabel (1,997) p value(0,025) < α (0,05)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel SAKD memiliki t hitung sebesar 2.734 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.025 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diteima. Ini berarti SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD dengan demikian hipotesis kedua terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan berimplikasi meningkatkan penilaian kinerja SKPD.

Dari tabel diatas dapat dianalisis berdasarkan koefisien–koefisiennya. Model persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel di atas adalah :

$$Y = 10.777 + 0.185(X2)$$

Dari fungsi regresi tersebut, diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo,2007). Dengan sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan laporan informasi yang kurang handal dan tidak relevan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lahirnya keputusan yang buruk. Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas anggaran yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengukur penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian kinerja

SKPD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

### **Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Untuk menguji hipotesis ketiga, dapat diperhatikan Tabel berikut :

**Tabel 11.**

#### **Hasil Pengaruh SIPKD terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Model	T	Sig.	Hasil
SIPKD	3.969	0.000	Berpengaruh

Dependen variabel: Penilaian Kinerja SKPD

t-hitung = 3,969 dan p value= 0,000  
t-hitung (3,969) > t-tabel (1,997) p  
value(0,000) <  $\alpha$  (0,05)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel SIPKD memiliki t hitung sebesar 3.969 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD dengan demikian hipotesis ketiga terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah maka akan berimplikasi meningkatkan penilaian kinerja SKPD.

Dari tabel diatas dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel di atas adalah :

$$Y = 10.777 + 0.479 (X_3)$$

Dari fungsi regresi tersebut, diketahui bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh

pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah daerah. Dari sistem ini, pimpinan SKPD dapat memonitoring sudah sejauh mana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah berapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program tersebut telah dilakukan dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian kinerja SKPD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

### **Pengaruh Penerapan *Good Government* terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Untuk menguji hipotesis keempat, dapat diperhatikan Tabel berikut :

**Tabel 12.**  
**Hasil Pengaruh Penerapan GG terhadap Penilaian Kinerja SKPD**

Model	T	Sig.	Hasil
Penerapan <i>Good Government</i>	3.166	0.001	Berpengaruh

Dependen variabel: Penilaian Kinerja SKPD

t-hitung = 3.166 dan p value= 0,001

t-hitung (3,166) > t-tabel (1,997) p

value(0,001) <  $\alpha$  (0,05)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Penerapan *Good Government* memiliki t hitung sebesar 3.166 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diteima. Ini berarti Penerapan *Good Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD dengan demikian hipotesis keempat terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan *Good Government* maka akan berimplikasi meningkatkan penilaian kinerja SKPD.

Dari tabel diatas dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel di atas adalah :

$$Y = 10.777 + 0.408 (X_4)$$

Dari fungsi regresi tersebut, diketahui bahwa Penerapan *Good Government* sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD.

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip

demokrasi, efesiensi, pencegahan/korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Dengan pengertian lain *good government* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintahan seperti organisasi publik pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang mencakup Kepemimpinan, Struktur organisasi dan sumberdaya manusianya.

Berdasarkan uraian diatas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi publik, struktur organisasi dan sumberdaya manusianya baik maka akan tercipta *Good Government* yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD itu sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan *good government* akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD, sehingga para *stakeholders* dalam hal ini masyarakat luas dapat merasa terpuaskan akan hasil kinerja organisasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bagus (2014) yang menjelaskan bahwa Penerapan *Good Government* berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Penerapan *Good Government* disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

Berdasarkan tabel diatas , diperoleh nilai standar *dized coefficient* tertinggi senilai 0.595, yang merupakan nilai dari variabel bebas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapat disimpulkan

bahwa variabel SIPKD mempunyai penilaian kinerja SKPD. pengaruh dominan ataupun kuat terhadap

### Uji Signifikan F (Uji F)

**Tabel 13**  
**Hasil Uji F-Hitung**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.603	4	30.901	8.533	.000 <sup>a</sup>
	Residual	235.382	65	3.621		
	Total	358.986	69			

a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Penilaian Kinerja SKPD

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian hasil F hitung sebesar 8.533 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diteima. Ini berarti anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan

daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan Penerapan *Good Government* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 14.**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 <sup>a</sup>	.443	.413	1.90296	1.316

a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Penilaian Kinerja SKPD

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel-variabel bebas (*independent variables*) dalam menjelaskan perubahan pada variabel tidak bebas (*dependent variable*) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk

mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. *Adjust R square* pada tabel 14 menunjukkan nilai 0,413. Hal ini menggambarkan bahwa sumbangan variabel independen (anggaran berbasis kinerja,

sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *good government* ) terhadap naik turunnya variabel dependen ( Penilaian Uji t ( t-test )

kinerja SKPD ) sebesar 41,3% sedangkan sisanya (58,7%) merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Tabel 15**  
**Hasil Uji T - Hitung**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.777	2.716		3.968	.000
Anggaran Berbasis Kinerja	1.078	.122	.092	2.638	.015
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.185	.116	.109	2.734	.025
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.479	.121	.595	3.969	.000
Penerapan Good Governance	.408	.150	.417	3.166	.001

a. Dependent Variable: Penilaian Kinerja SKPD

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penilaian kinerja SKPD di kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 17, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula

Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Penilaian kinerja SKPD. Anggaran Berbasis Kinerja disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian kinerja SKPD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Silalahi (2012) yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian kinerja SKPD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.
4. Penerapan *Good Government* berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Penerapan *Good Government* maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bagus (2014) yang menjelaskan bahwa Penerapan *Good Government* berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Penerapan *Good Government* disini sangat mendukung Penilaian Kinerja SKPD.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan agar :

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel tidak hanya pada Pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu saja tetapi mungkin dengan sampel seluruh Pemerintahan di Indonesia akan didapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan Penelitian selanjutnya memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang akuntansi keuangan.
3. Bagi Akademisi Diharap dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan *good government* terhadap penilaian kinerja SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bagi Organisasi Publik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna bagi organisasi publik, khususnya organisasi publik di Kabupaten Indragiri Hulu dalam menerapkan kebijakannya sehingga kinerja akuntabilitas organisasi publik tersebut menjadi lebih baik.
5. Bagi Pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi pihak-pihak lain

yang bersangkutan dan Penelitian selanjutnya di kabupaten atau kota lain di seluruh Indonesia, dan kegunaan

tersebut dapat berdampak baik bersifat praktis maupun teoritis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rohman 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda di Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol. 9 no.1 ISSN 1412-0852.
- Anggarsari, Lia 2009, Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Survei Pada SKPD Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Vol.4, no.1 ISSN 1907-9958
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Ghozali Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta. Skripsi Akuntansi
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2009, Metode Penelitian Bisnis BPFY Yogyakarta, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- LAKIP Kamar Tahun 2009.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance.
- Mardiasmo, 2007, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Oktari, Rianti. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kab. Kamar. Skripsi, Universitas Riau: Pekanbaru.
- Paulus Silalahi, Sem 2012, Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja SKPD (Studi Pemerintahan di Kota Dumai). Jurnal Akuntansi Vol.20 no.3
- Peraturan Pemerintah, No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- , Undang-undang No. 25 Tahun 2004. Tentang Keuangan Negara Yang Mengatur pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan penganggaran di daerah
- , Undang-undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

-----, Undang-undang No 15/2004  
tentang Pemeriksaan dan Tanggung  
jawab Pengelolaan Keuangan Negara

-----, Undang-undang No 32/2004  
tentang Pemerintahan Daerah

-----, Undang-undang No 33/2004  
tentang Perimbangan Keuangan  
Pusat dan Daerah

Santoso, Singgih. 2007. Menguasai Statistik  
di Era Reformasi dengan SPSS, PT  
Elex Media Komputindo ; Jakarta.

Sihaloho dan Halim. 2005. Pengaruh faktor-  
faktor rasional, politik dan kultur.  
Organisasi terhadap pemanfaatan  
informasi kinerja instansi pemerintah  
daerah. Solo: SNA 8.

Sugiono, 2007, Metode Penelitian Bisnis,  
Alfabeta, Bandung.

Tjhai Fung Jin. 2003. Analisis Faktor-Faktor  
yang Mempengaruhi Pemanfaatan  
teknologi Informasi dan Pengaruh  
Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Terhadap Kinerja Akuntan Publik.  
Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 5(1): 1-  
26

Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif  
Sistem Akuntansi Online Berbasis  
Komputer. Penerbit ANDI,  
Yogyakarta

[www.indragirihulu.go.id](http://www.indragirihulu.go.id)